



UNIVERSITAS LAMPUNG

SEMINAR PROPOSAL

# IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DI PROVINSI LAMPUNG MELALUI PENDEKATAN *STREET-LEVEL BUREAUCRACY*

Disusun Oleh: NPM  
ALYA SEPTIANI 2216041113

Dosen Pembimbing  
Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA

Dosen Pembahas  
Dodi Faedulloh, S.Sos., M.Si.



# Latar Belakang

- Pendidikan → kunci pembangunan, tapi masih timpang
- Data BPS 2024: 24 juta jiwa miskin (tinggi → berdampak ke putus sekolah)
- Program nasional Sekolah Rakyat (500 sekolah, anggaran ± Rp100 M/sekolah)



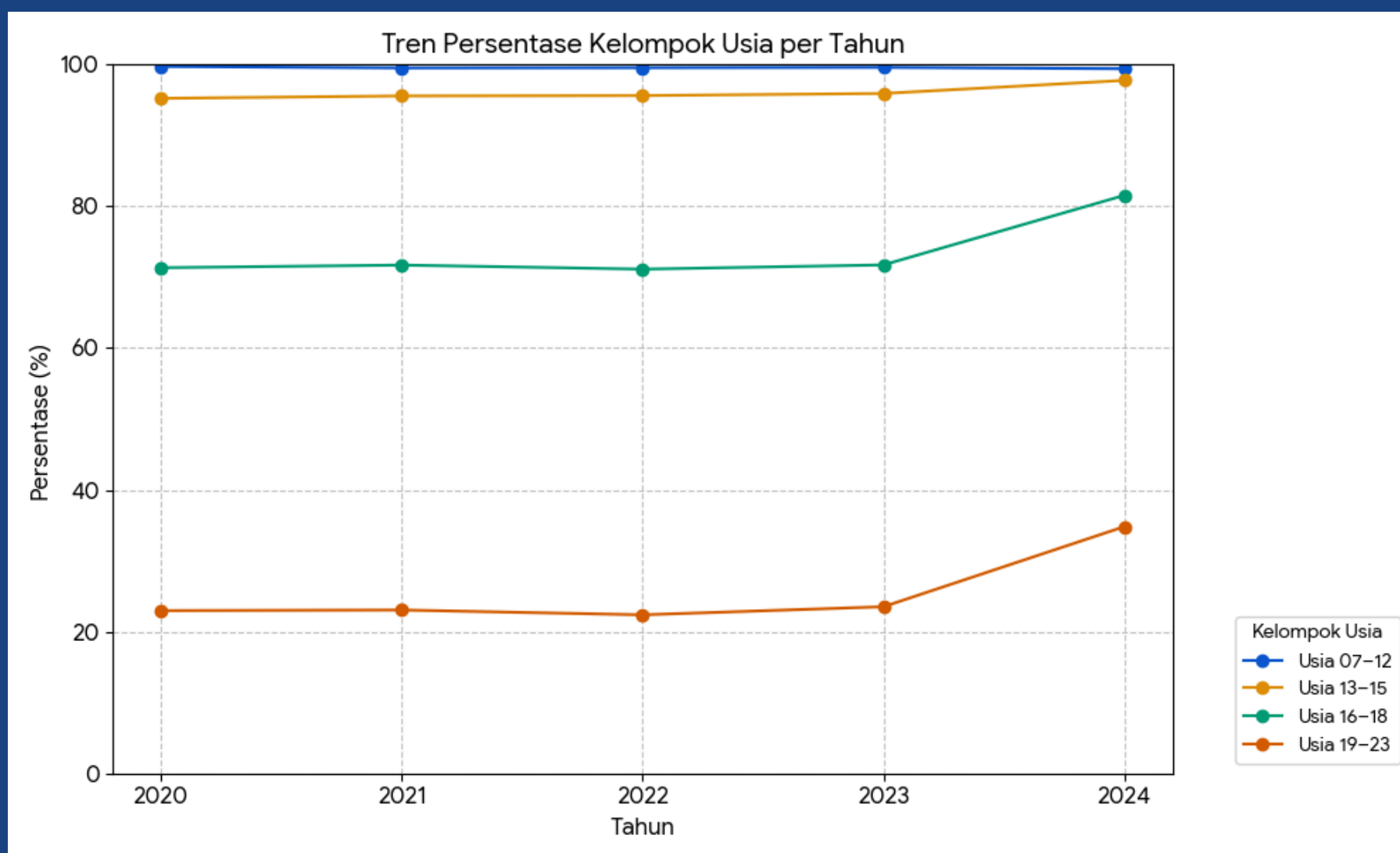
# Latar Belakang

Tabel 1. Presentase Angka Putus Sekolah (APS) Provinsi Lampung (2023).

Kategori	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	0,10%	1,35%	1,25%
Perempuan	0,12%	0,59%	0,81%
<b>Berdasarkan Lokasi</b>			
Perkotaan	0,05%	0,78%	1,17%
Perdesaan	0,19%	1,25%	0,94%
<b>Total</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,03%</b>

Sumber: RRI.co.id

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung (2020-2024)



Lampung → APK pendidikan tinggi peringkat 35/38 provinsi



# Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung ditinjau melalui pendekatan Street-Level Bureaucracy?

# Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan implementasi Program Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung dengan menggunakan perspektif Street-Level Bureaucracy.



# MANFAAT PENELITIAN



## Manfaat teoritis:

Berkontribusi pada kajian ilmu administrasi Negara, khususnya implementasi kebijakan pendidikan melalui perspektif Street-level bureaucracy.



## Manfaat Praktis:

- Memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menyempurnakan desain program.
- Menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung serta pemerintah daerah.

# TINJAUAN PUSTAKA

## PENELITIAN TERDAHULU

01

**Alsharefeen, R. (2025).**

Dosen bertindak sebagai birokrat lapangan, menggunakan diskresi dan strategi koping (edukasi preventif, modifikasi tugas) untuk mengatasi tantangan plagiarisme AI, sehingga menjadi pembuat kebijakan de facto di lapangan.

02

**Akhyar, Y. (2024).**

Kebijakan zonasi, meskipun bertujuan pemerataan, menimbulkan tantangan implementasi seperti ketidakpuasan orang tua dan kesenjangan fasilitas, yang membutuhkan peran aktif aktor lapangan.

03

**Madani et al. (2021)**

Birokrat lapangan di Dinas Pertanian berperan sebagai supervisor dan pemantau di tingkat akar rumput, membuktikan konsep SLB relevan dalam konteks birokrasi di Indonesia.

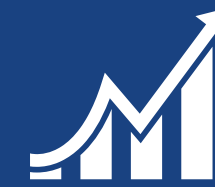


# LANDASAN TEORI



## KEBIJAKAN PUBLIK

Keputusan dan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Dye, Lasswell)



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Proses eksekusi kebijakan dari "on paper" ke "on field". Model: Top-Down, Bottom-Up, Hybrid.

- Pemahaman makro tentang Kebijakan Publik sebagai keputusan otoritatif pemerintah untuk mencapai tujuan.
- Implementasi Kebijakan, yang merupakan proses transisi dari visi kebijakan menjadi realitas, di mana sering terjadi 'celah implementasi' (implementation gap).



# LANDASAN TEORI

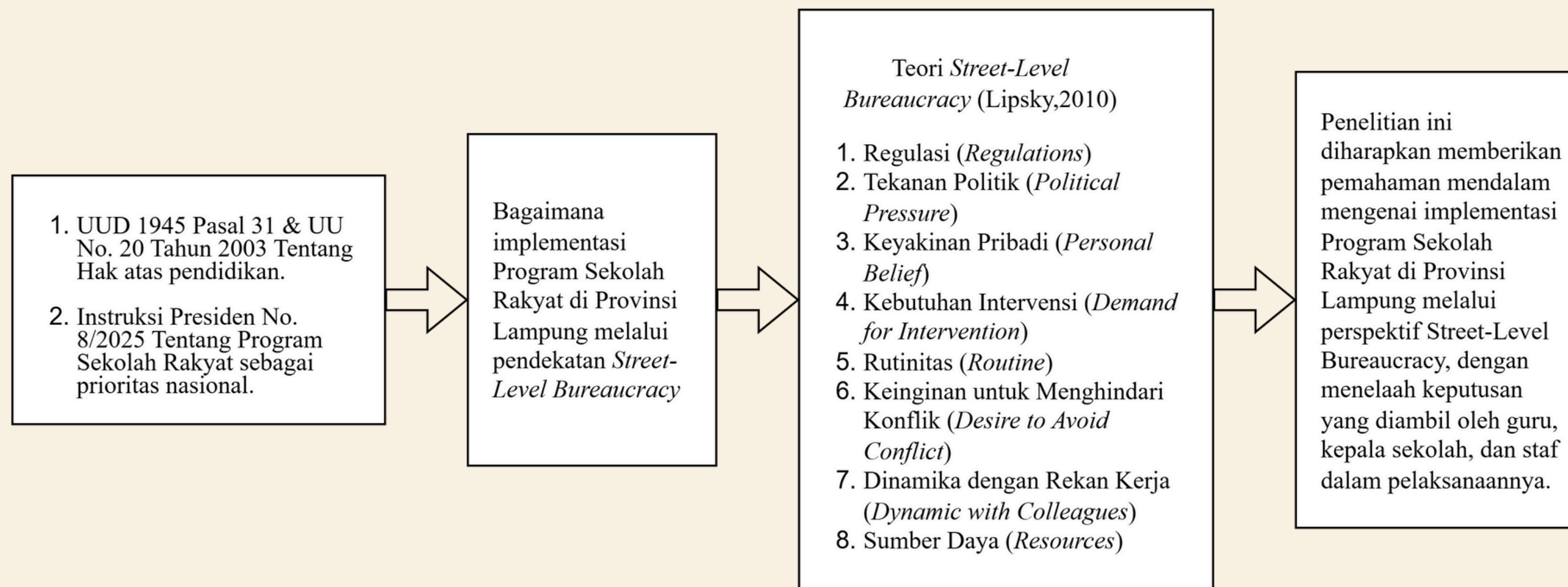
## ***STREET-LEVEL BUREAUCRACY (Lipsky, 2010)***

- Konsep : Birokrat tingkat lapangan (teachers, principals, social workers) adalah pembuat kebijakan de facto.
- Dilema : Keterbatasan sumber daya, permintaan tinggi, tujuan yang ambigu.
- Reaksi : Menggunakan diskresi dan strategi coping yang sering menyimpang dari aturan formal.





# KERAGKA PEMIKIRAN





# METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis Penelitian

Kualitatif, Pendekatan Studi Kasus (Field Research)

## Fokus dan Lokasi Penelitian

Implementasi Program Sekolah Rakyat di SRMA 32 Lampung Selatan.

## Sumber Data

- Primer: Wawancara Mendalam & Observasi Partisipatif.
- Sekunder: Dokumentasi (Inpres, BPS, Laporan)



1

## TEKNIK PENGUMPULAN DATA

**Sugiyono (2023)**

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

2

## INFORMAN

1. Kepala sekolah
2. Guru
3. Wali asrama
4. Pendamping PKH

Teknik pemilihan: Purposive Sampling  
(berdasarkan keterlibatan langsung).



## ANALISIS DATA



### **Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2023)**

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

## UJI KEABSAHAN DATA



### **Uji Keabsahan Data**

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Credibility     | 3. Dependability  |
| 2. Transferability | 4. Confirmability |

***TERIMA KASIH***